

LAPORAN AKHIR PENELITIAN MP3EI

**RESOLUSI KONFLIK MELALUI DISAIN MANAGEMEN
PROGRAM SINERGI REVITALISASI ANTARA PEMERINTAH
(DISBUN/DISTAMBEN) DENGAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) BERBASIS KORIDOR
PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KALIMANTAN TIMUR**



PENELITI

**PROF . DR. A. HARDOKO, MPD
PROF . DR. SUSILO , MPD
DR. JAWATIR PARDOSI, M.Si**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2012**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Topik Kegiatan : Resolusi Konflik Melalui Disain Managemen Program Sinergi Revitalisasi Antara Pemerintah (Disbun/Distamben) Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Koridor Pemberdayaan Ekonomi di Kalimantan Timur
2. Fokus : Pusat produksi, pengolahan hasil tambang, dan lumbung Energi di Kalimantan
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd
 - b. Jenis kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19570829 198503 1 002
 - d. NIDN : 29085706
 - e. Jabatan Struktural: -
 - f. Jabatan Fungsional: Guru Besar
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman
 - h. Fakultas/Jurusan : FKIP/IPS
 - i. Alamat : Jl. Muara Pahu, Kampus Gunung Kelua Samarinda
 - j. Telpun : 0541 741033
 - k. Alamat Rumah : Jl. D.I. Panjaitan-Indovice, RT 67/37 Samarinda
 - l. Telpun/fax/email : 0541 200434/ aloyssiushardoko@yahoo.co.id
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) tahun (keseluruhan)
5. Usulan ini usulan tahun ke : I (Satu)
6. Pembiayaan
 - a. Jumlah yang diajukan ke Dikti tahun I : Rp 150.000.000
 - b. Jumlah Biaya yang disetujui Dikti tahun I : Rp 125.000.000
7. Mitra : -
8. Kontribusi dari mitra : -



Samarinda, 27 - 11 - 2012

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd
NIP: 19570829 198503 002

Menyetujui,

Rektor Universitas Mulawarman

Prof. Dr. I. Amruddin Hasid, SE., SU
NIP: 19550410 198301 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Urgensi Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Konflik	6
B. Berbagai Pendekatan Dalam Mengelola Konflik	12
C. Teori-Teori Berbagai Penyebab Konflik	13
D. Analisis Konflik	16
E. Sumber Konflik dan Bencana Sosial	21
F. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)	24
G. Pelaksanaan Program CSR (Corporate Social Responsibility)	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Instrumen Penelitian	35
C. Pengambilan Sampel	36
D. Matriks Metode Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Sumbu Konflik (sasaran dan perilaku)	11
2. Pendekatan dalam Berbagai Konflik	13
3. Metode Pengambilan Keputusan Integrasi	15
4. Segitiga SPK	18
5. Rancangan Program CSR yang sesuai	31
6. Skema Analisis Data Kualitatif	38
7. Prosedur Penyelesaian Konflik oleh Pemerintah	58
8. Prosdur Penyelesaian konflik oleh Perusahaan	59
9. Prosedur Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat	59
10. Disain Managemen Resolusi Konflik Program Revitalisasi	70

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan kepada Tuhan bahwa laporan penelitian ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pengembangan disain resolusi konflik yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan konflik yang selama ini menggurita.

Kami selaku tim peneliti, pada kesempatan yang amat baik ini mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Dirjen Dikti yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan dukungan dana sepenuhnya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini. Penyelesaian konflik dipandang amat penting sebab sangat mempengaruhi stabilitas pemerintahan, stabilitas jalanya perusahaan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Dengan selesainya penelitian MP3EI ini, semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perberdayaan ekonomi di Kalimantan pada umumnya, dan perberdayaan ekonomi di Kalimantan Timur pada khususnya.

Samarinda, 25 Nopember 2012

Peneliti

LAPORAN AKHIR

MP3EI

RESOLUSI KONFLIK MELALUI DISAIN MANAGEMEN PROGRAM SINERGI REVITALISASI ANTAR PEMERINTAH (DISBUN/DISTAMBEN) DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* BERBASIS KORIDOR PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KALIMANTAN TIMUR

HARDOKO, SUSILO, PARDOSI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Seiring dengan menjamurnya pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, maka dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat adalah terjadinya konflik, baik bersifat horisontal maupun vertikal. Konflik yang terjadi diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu resolusi yang ditempuh adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program CSR berdasarkan kepada prinsip pemberdayaan sumber daya masyarakat (penciptaan lapangan kerja), bukan sekedar program “charity” yang diberikan oleh pihak perusahaan. Berbagai penyelesaian masalah sudah dilakukan, namun masih menemukan jalan buntu, sehingga diperlukan resolusi konflik melalui disain manajemen program sinergi secara terpadu.

Penelitian ini bertujuan membentuk jejaring kerjasama (kemitraan) sebagai upaya mencari solusi atas kasus kerawanan sosial akibat konflik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Di samping itu penelitian ini juga bertujuan mengembangkan disain manajemen dalam mengatasi berbagai macam konflik, dan menemukan resolusi konflik untuk memecahkan permasalahan kasus konflik yang terjadi.

Hasil penelitian : 1) berbagai kasus konflik yang terjadi di perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit meliputi: kasus pembebasan lahan dan ganti rugi, tumpang tindih lahan, tidak optimalnya peluang bagi SDM lokal bekerja di perusahaan, kerusakan lingkungan (banjir, polusi udara, penyakit kulit), sumber air habis, ladang berpindah terusik, dari pihak pemerintah tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait, kasus kebun plasma yang tidak menjadi prioritas, dan sengketa tanah adat, 2) Penyelesaian kasus konflik yang dilakukan dan terjadi selama ini di lapangan adalah: jalur litigasi oleh perusahaan, demonstrasi damai dan kekerasan oleh warga masyarakat (pemortalan akses perusahaan, pengrusakan fasilitas perusahaan dan tindakan anarkhis lainnya), 3) Sedangkan resolusi konflik melalui disain manajemen (adopsi: Burke & Simon Fisher, 2003) melalui penyelesaian dengan cara non-litigasi (mediasi) melibatkan semua yang terkait, win-win solution, dan membangun area food-estate untuk masyarakat, teknologi tepat guna (“landfill”) dan melakukan konservasi alam (kearifan lokal) untuk menjaga kelangsungan SDA.

Kata kunci: Disain manajemen, resolusi konflik, perusahaan (CSR), pemerintah, dan masyarakat

ABSTRACT
CONFLICT RESOLUTION PROGRAM MANAGEMENT THROUGH DESIGN REVITALIZATION
SYNERGY BETWEEN GOVERNMENT (DISBUN / DISTAMBEN) WITH CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) CORRIDOR BASED ECONOMIC EMPOWERMENT IN EAST
KALIMANTAN

A. Hardoko, Susilo, Pardosi

Along with the proliferation of coal mining and oil palm plantations in East Kalimantan, the impact to the community is a conflict, both horizontal and vertical. Conflicts caused by a lack of communication between the government, business and society. Therefore, one of the resolutions to be taken is to do the planning and implementation of CSR programs is based on the principle of empowerment of community resources (job creation), not just the "charity" provided by the company. A variety of problem solving has been done, but there is still a stalemate, so the required resolution of conflicts through the design of an integrated management program synergies.

This study aims to establish networks of cooperation (partnership) as the search for a solution to the case of social unrest due to the conflict between the government, business and society. In addition, this study also aims to develop a design management in the range of conflicts, and find conflict resolution to solve the case of the conflict. The results: 1) various cases of conflict in the coal mining companies and oil palm plantations covering: the case of land acquisition and compensation, overlapping, not optimal opportunities for local human resources working in the corporate, environmental damage (floods, air pollution, skin diseases), depleted water resources, shifting cultivation disturbed, of the lack of coordination with government agencies, plasma cases are not a priority, and customary land dispute, 2) Settlement of conflicts that do occur during this time and in the field are: litigation by the company line, peaceful and violent demonstrations by citizens (pemortalan corporate access, destruction of company facilities and other anarchic actions), 3) The resolution of the conflict through the design of management are: the completion of a non-litigation (mediation) involving all concerned, win-win solution between the tripartite building area food-estate to the public, appropriate technology ("landfill") and nature conservation (local wisdom) to preserve the natural resources.

Keywords: Design management, conflict resolution, (CSR), government, and society

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit yang pesat di Kalimantan timur mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun di balik sisi pertumbuhan ekonomi tersebut, pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur juga membawa dampak negative bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Dampak negative yang terjadi adalah munculnya berbagai kasus konflik antara pihak perusahaan, pemerintah dan warga masyarakat.

Konflik dalam berbagai kasus seperti tumpang tindih lahan, ganti rugi yang tidak sesuai, banjir akibat tambang, polusi debu, berbagai penyakit sebagai dampak tambang dan perkebunan membuat kondisi di tengahwarga masyarakat sekitar area tambang/perkebunan tidak kondusif dan mengganggu kelancaran perusahaan itu sendiri. Berbagai upaya pemecahan juga sudah dilakukan, namun tidak kunjung selesai dan tidak memberikan rasa keadilan pada kedua belah pihak.

Masing-masing pihak bertahan sesuai dengan cara yang dipilih, sehingga perlu dilakukan upaya resolusi konflik yang mampu diterima kedua belah pihak. Hal yang utama sebenarnya adalah kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan pemerintah dan warga masyarakat sekitar perusahaan.

Bertolak dari beberapa kasus sengketa lahan di Kalimantan Timur, maka daerah yang mengalami banyak konflik untuk perkebunan kelapa sawit adalah di Kabupaten Pasir, sedangkan untuk kasus tambang batubara lebih banyak berada di Kutai Kartanegara. Sementara di daerah Kubar (Kutai Barat) dan Kutim (Kutai Timur) memiliki karakteristik yang sama, namun kasus yang terjadi sebagai konflik tidak sebanyak yang terjadi di Kabupaten Pasir dan di Kutai Kartanegara.

Khususnya di Kalimantan Timur, operasional wilayah perkebunan, pertambangan menempati urutan terbesar mencapai kisaran 60%, baik berskala nasional maupun internasional. Kondisi seperti ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan khusus bagi pemerintah dan pihak perusahaan sendiri. Lebih-lebih dapat mengancam stabilitas pemerintah dan keberlangsungan perusahaan, karena masyarakat khususnya yang berada di sekitar

lokasi perkebunan/pertambangan merasakan bahwa modal sosial dalam diri mereka ternyata hingga saat ini kurang diakomodir dan direspon, baik oleh pemerintah maupun pihak perusahaan.

Masyarakat belum merasakan manfaat pemenuhan kesejahteraan jangka pendek apalagi jangka panjangnya. Di samping itu, masyarakat merasa bahwa bahan baku berada di areal atau lokasi di mana mereka tinggal. Hal ini memicu adanya kecenderungan terjadinya konflik dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerawanan sosial yang mengganggu kestabilan semua pihak, baik di pihak pemerintah sendiri maupun pada pihak perusahaan serta dalam diri masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, adanya pemberdayaan pada masyarakat dari berbagai aspek untuk peningkatan kesejahteraan dirasakan amat mendesak untuk segera diatasi dan menjadi perhatian yang serius dari berbagai pihak, serta pentingnya mencari resolusi konflik sebagai upaya pemecahan masalah, baik berasal dari pemerintah maupun perusahaan yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian hal yang paling menarik dalam upaya mencari resolusi konflik dalam berbagai kasus yang muncul adalah bagaimana memahami konflik untuk sendiri. Masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di dalam interaksi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan terjadi pandangan yang berbeda. Pandangan masyarakat terhadap aspek sosial dan politik berbeda dengan pandangan perusahaan dan pemerintah. Sudut pandang yang berbeda terhadap permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak dapat dihindarkan dan itu dapat memperkaya semua pihak.

Berbagai perbedaan yang ada dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu: dimensi “alami” dan dimensi yang terjadi akibat kondisi tertentu, seperti: status, kekuasaan, dan sebagainya. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika semua pihak memiliki maksud yang sama atau melihat perbedaan itu sebagai sumber daya yang menuntun ke arah pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah dan perbaikan situasi yang sedang dihadapi.

Kondisi konkrit di lapangan menunjukkan bahwa program CSR sudah banyak dilakukan oleh pihak perusahaan, baik oleh perusahaan tambang batubara maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Berbagai program yang dijalankan oleh perusahaan sesuai dengan rancangan manajemen perusahaan dan disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan dari pihak perusahaan itu sendiri. Program yang dilakukan

memang memberi manfaat bagi masyarakat, namun manfaat yang ada bersifat manfaat sementara, dan tidak memberi manfaat yang bersifat pemberdayaan sumber daya masyarakat dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, yaitu mengkaji permasalahan yang muncul dan berupaya menemukan alternative resolusi konflik melalui disain manajemen dalam upaya menyelesaikan kasus konflik yang terjadi antara pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

2. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara secara mendalam (depth-interview), dengan didukung observasi, baik langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, juga dilakukan FGD dengan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dilengkapi dengan studi literature dan dokumentasi.

Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara mendalam yang diperoleh langsung pihak yang terkait (Distamben, Disbun, perusahaan) yang memiliki konflik, Kecamatan, Kelurahan, dan tokoh masyarakat, warga sekitar area lahan perusahaan, serta LSM) dan pelaksanaan program CSR oleh perusahaan. Data sekunder adalah seluruh data yang mendukung dan memperkaya serta memperkuat hasil wawancara dan observasi lapangan.

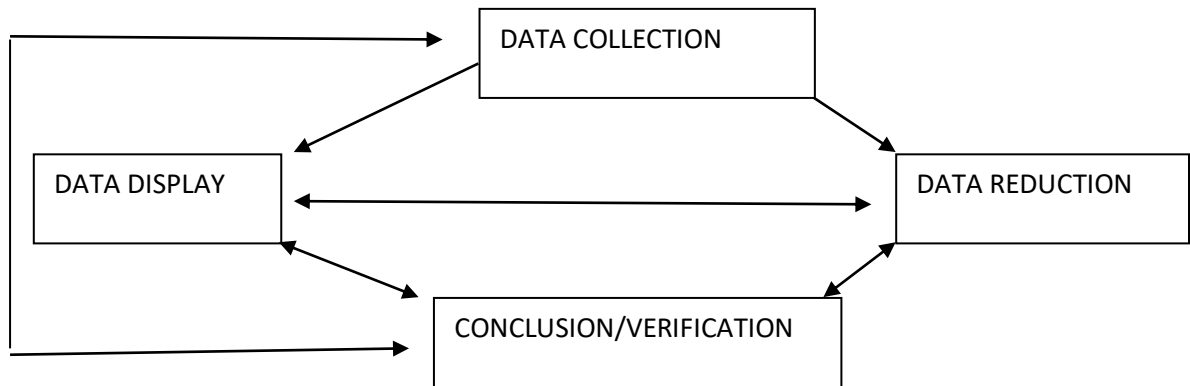
3. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik “purposive sampling” dengan criteria tertentu, yaitu: 1) daerah yang paling banyak memiliki ijin konsesi pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, 2) daerah ring 1, yaitu daerah yang dekat dengan pemukiman penduduk, 3) area tambang dan perkebunan kelapa sawit yang mempunyai kasus konflik dengan warga sekitar. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan mengembangkan informan melalui triangulasi dengan pola snowball sampling.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan konflik dan resolusi konflik dalam rangka menyusun disain manajemen resolusi konflik yang diharapkan.

Secara garis besar analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Miles Huberman, 1994

HASIL PENELITIAN

Dari deskripsi yang sudah diuraikan dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut:

(a) Kasus konflik yang terjadi pada perusahaan tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur terdiri dari: 1) Kasus konflik pembebasan lahan, tumpang tindih lahan dan ganti rugi yang tidak sesuai dan bahkan ada yang belum memperoleh), 2) Kurangnya pemberian kesempatan bagi warga sekitar untuk menjadi pekerja di perusahaan, 3) Kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada warga masyarakat sekitar (banjir, polusi udara, penyakit kulit), 4) Ladang berpindah terganggu oleh aktivitas tambang, 5) Sumber air habis akibat penggalian tambang, 6) Tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam proses perijinan, 7) Kasus pembangunan kebun plasma, 8) Tanah adat atau hak ulayat. (b) Upaya yang ditempuh untuk melakukan resolusi konflik pada kasus konflik yang terjadi di perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur adalah : pada umumnya perusahaan swasta dan juga perusahaan negara selalu memilih dan memanfaatkan mekanisme “litigasi”, yaitu memasukkan kasus konflik lahan ke ranah pengadilan. Dan hasil keputusan pengadilan sudah dapat diduga memenangkan pihak perusahaan, karena memiliki dokumen-dokumen resmi dan legal yang membuktikan kepemilikan atau hak pengelolaan atas areal lahan tersebut. Sementara itu komunitas adat, petani selalu kalah dalam proses pengadilan karena pada kelompok ini hanya memiliki bukti adat seperti ceritera atau surat kesaksian yang tidak diakui oleh pihak pengadilan. Proses litigasi sering menyebabkan komunitas kecil merasa tidak mendapat perlakuan yang adil. Kasus lainnya terkait dengan dampak keberadaan lahan perusahaan kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung tidak ada kepedulian (c) Resolusi konflik melalui disain manajemen untuk

memecahkan kasus konflik yang terjadi dilakukan melalui : a) pendekatan Non -Litigasi (yaitu melalui mediasi dialog kelompok yang terlibat konflik). Penyelesaian konflik melalui non-litigasi dilakukan dengan pertimbangan bagi mereka yang bersengketa sebagai upaya penyelesaian yang cepat karena tanpa prosedur pengadilan pada umumnya dengan menggunakan pola “Tripartit”. Penyelesaian biasanya berakhir dengan “win-win solution”, yaitu menguntungkan masing-masing pihak yang bersengketa. Misalnya: penyediaan lahan plasma, namun berada di luar area perkebunan, b) membangun daya dukung bagi kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lahan untuk “food- estate” oleh pemerintah propinsi Kalimantan Timur dan c) melindungi kepentingan ekonomi masyarakat dan pelestarian sumber daya alam melalui pola konservasi alam.

KESIMPULAN

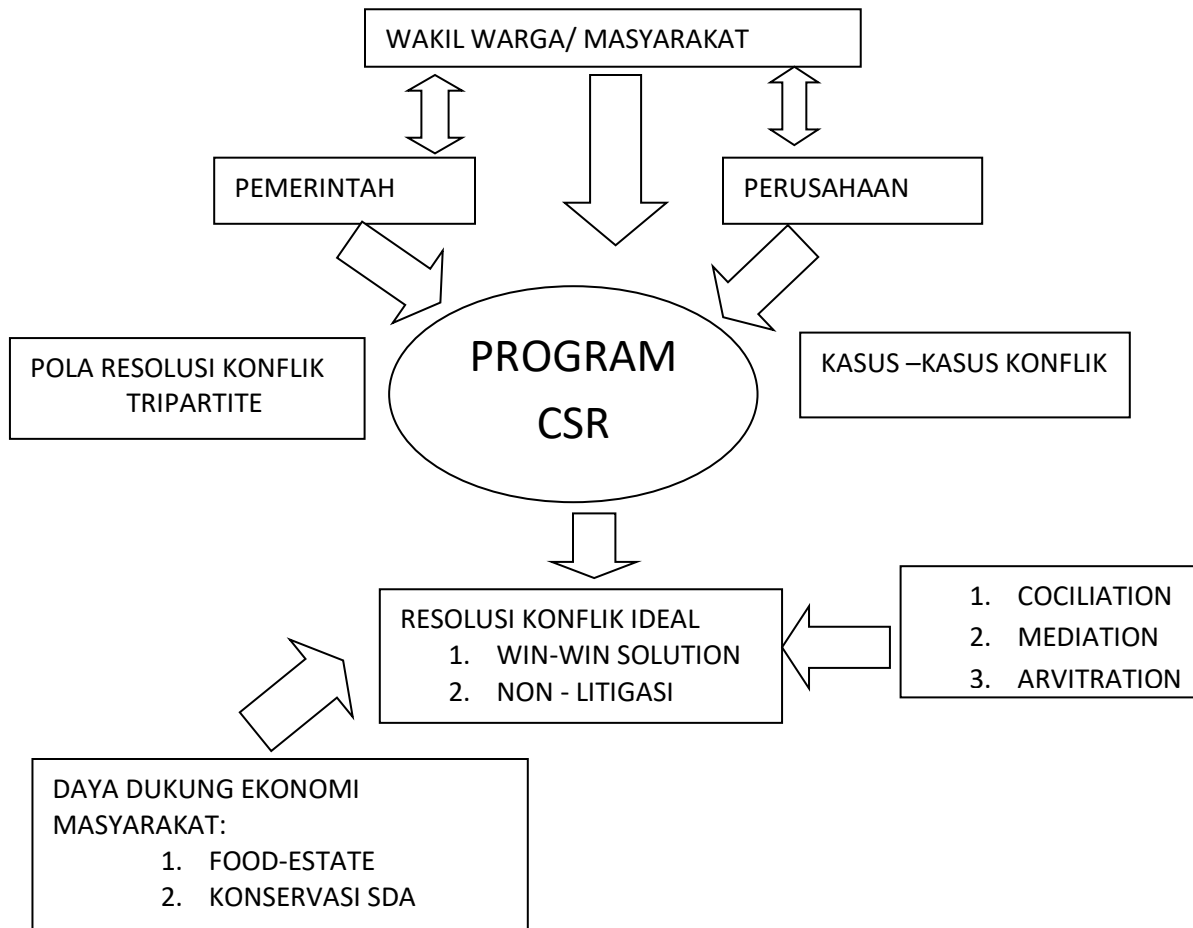
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Kasus konflik terjadi pada area tambang batu bara dan lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur
2. Penyelesaian konflik yang dilakukan selama ini adalah melalui jalur litigasi oleh perusahaan dan demonstrasi (damai dan kekerasan) oleh warga sekitar.
3. Program CSR telah dijalankan oleh perusahaan (tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit), namun belum sesuai dengan konsep dasar program CSR yang benar
4. Resolusi konflik dalam disain manajemen dilakukan dengan prosedur non-litigasi, food-estate dan perlindungan lahan konservasi alam.

KESIMPULAN

Resolusi konflik melalui disain manajemen program revitalisasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) terjadi berbagai kasus konflik yang ada di perusahaan tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat, 2) upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh perusahaan ditempuh melalui jalur litigasi, 3) upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah ditempuh melalui jalur mediasi, 4) upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat adalah demonstrasi dan cenderung anarkhis, 5) resolusi konflik yang dilakukan dalam disain manajemen program

revitalisasi dalam penelitian ini adalah : non-litigasi melibatkan unsure tripartite dengan pola penyelesaian konflik “win-win solution”, membangun daya dukung ekonomi melalui food-estate dan melindungi kepentingan ekonomi masyarakat dan pelestarian sumber sumber daya alam melalui pola konservasi alam. Secara skematik dapat ditampilkan sebagai berikut:



Gambar : Disain Managemen Resolusi Konflik Program Sinergi Revitalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sadikin, 2009. *Implementasi Program CSR pada Masyarakat Sekitar Tambang Batu bara di Kubar*, Thesis (tidak dipublikasikan), Unmul, Samarinda
- Anonim, 2012. *CSR Kembangkan Pertanian*, Kaltim Pos, Juli 2012
- Anonim, 2012. *Food Estate Masih Tertinggal*, kaltim Pos, September 2012
- Bachriadi, Dianto. 1999. *Gerakan Petani dan Tumbuhnya Organisasi Petani di Indonesia*
- Batten, T.R., 1967. *Communitiest and their Development*, London University Press
- Irwin, Harry, 1994. *Managing Corporate Communication*, Malaysia
- Irwanto, 2006. *Focussed Group Discussion , Sebuah Pengantar*, Jakarta, yayasan Obor

Isran Noor, 2012. *CSR Bisa Entaskan Kemiskinan*, Kaltim Pos: Agustus 2012

Jim Ife, 1995. *Community Development, Analysis and Practice*, longman, Australia

Mursyid R., 2012. *Mayoritas Tambang Tidak Taat Aturan*, Kaltim Pos, 4 September

Nasution S., 1988. *Penelitian Naturalistik*, Jemmars, Bandung

Anonim, 2012. *Food Estate Masih Tertinggal*, kaltim Pos, September 2012

Pambudi T.S. 2005. *CSR Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Puspennas Depsos, RI, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Executive Summary

RESOLUSI KONFLIK MELALUI DISAIN MANAGEMEN PROGRAM SINERGI REVITALISASI ANTAR PEMERINTAH (DISBUN/DISTAMBEN) DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)BERBASIS KORIDOR PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KALIMANTAN TIMUR

A. HARDOKO, SUSILO, PARDOSI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit yang pesat di Kalimantan timur mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun di balik sisi pertumbuhan ekonomi tersebut, pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur juga membawa dampak negative bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Dampak negative yang terjadi adalah munculnya berbagai kasus konflik antara pihak perusahaan, pemerintah dan warga masyarakat.

Konflik dalam berbagai kasus seperti tumpang tindih lahan, ganti rugi yang tidak sesuai, banjir akibat tambang, polusi debu, berbagai penyakit sebagai dampak tambang dan perkebunan membuat kondisi di masyarakat sekitar area tambang/perkebunan tidak kondusif dan mengganggu kelancaran perusahaan itu sendiri. Berbagai upaya pemecahan masalah konflik juga sudah dilakukan, namun tidak kunjung selesai dan tidak memberikan rasa keadilan pada kedua belah pihak.

Masing-masing pihak bertahan sesuai dengan cara yang dipilih, sehingga perlu dilakukan upaya resolusi konflik yang mampu diterima kedua belah pihak. Hal yang utama sebenarnya adalah kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan pemerintah dan warga masyarakat sekitar perusahaan. Bertolak dari beberapa kasus sengketa lahan di Kalimantan Timur, maka daerah yang mengalami banyak konflik untuk perkebunan kelapa sawit adalah di Kabupaten Pasir, sedangkan untuk kasus tambang batubara lebih banyak berada di Kutai Kartanegara. Sementara di daerah Kubar (Kutai Barat) dan Kutim (Kutai Timur) memiliki karakteristik yang sama, namun kasus yang terjadi sebagai konflik tidak sebanyak yang terjadi di Kabupaten Pasir dan di Kutai Kartanegara.

Khususnya di Kalimantan Timur, operasional wilayah perkebunan, pertambangan menempati urutan terbesar mencapai kisaran 60%, baik berskala nasional maupun internasional. Kondisi seperti ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan khusus bagi pemerintah dan pihak perusahaan sendiri. Lebih-lebih dapat mengancam stabilitas pemerintah dan keberlangsungan perusahaan, karena masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi perkebunan/pertambangan merasakan bahwa modal sosial dalam diri mereka ternyata hingga saat ini kurang diakomodir dan direspon, baik oleh pemerintah maupun pihak perusahaan.

Masyarakat belum merasakan manfaat pemenuhan kesejahteraan yang sesungguhnya, baru bersifat sementara, sebab belum menyentuh pemberdayaan potensi masyarakat. Di samping itu, masyarakat merasa bahwa bahan baku berada di areal atau lokasi di mana mereka tinggal. Hal ini memicu adanya kecenderungan terjadinya konflik dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerawanan sosial yang mengganggu kestabilan semua pihak, baik di pihak pemerintah sendiri maupun pada pihak perusahaan serta dalam diri masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, adanya pemberdayaan pada masyarakat dari berbagai aspek untuk peningkatan kesejahteraan dirasakan amat mendesak untuk segera diatasi dan menjadi perhatian yang serius dari berbagai pihak, serta pentingnya mencari resolusi konflik sebagai upaya pemecahan masalah, baik berasal dari pemerintah maupun perusahaan yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian hal yang paling menarik dalam upaya mencari resolusi konflik dalam berbagai kasus yang muncul adalah bagaimana memahami konflik untuk sendiri. Masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di dalam interaksi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan terjadi pandangan yang berbeda. Pandangan masyarakat terhadap aspek sosial dan politik berbeda dengan pandangan perusahaan dan pemerintah. Sudut pandang yang berbeda terhadap permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak dapat dihindarkan dan itu dapat memperkaya semua pihak.

Berbagai perbedaan yang ada dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu: dimensi “alami” dan dimensi yang terjadi akibat kondisi tertentu, seperti: status, kekuasaan, dan sebagainya. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika semua pihak memiliki maksud yang sama atau melihat perbedaan itu sebagai sumber daya yang menuntun ke arah pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah dan perbaikan situasi yang sedang dihadapi.

Kondisi konkrit di lapangan menunjukkan bahwa program CSR sudah banyak dilakukan oleh pihak perusahaan, baik oleh perusahaan tambang batubara maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Berbagai program yang dijalankan oleh perusahaan sesuai dengan rancangan manajemen perusahaan dan disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan dari pihak perusahaan itu sendiri. Program yang dilakukan memang memberi manfaat bagi masyarakat, namun manfaat yang ada bersifat manfaat sementara, dan tidak memberi manfaat yang bersifat pemberdayaan sumber daya masyarakat dalam jangka panjang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan dan pelaksanaan program CSR yang dijalankan oleh perusahaan (tambang Batubara dan perkebunan kelapa sawit) selama ini?
2. Konflik apa saja yang terjadi antara pihak pemerintah, perusahaan dan pihak masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit ?
3. Bagaimanakah upaya resolusi yang dapat dilakukan dalam memecahkan konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat?
4. Bagaimanakah disain manajemen resolusi konflik yang dibutuhkan dengan langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Membentuk jejaring kerja sama/ kemitraan antara pihak perguruan tinggi dan mitra sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan di bidang kerawanan social yang berkaitan dengan resolusi konflik yang sering terjadi antara pemerintah- perusahaan (CSR) dan masyarakat.
2. Pengembangan disain manajemen program sinergi revitalisasi yang secara bertahap dapat dialihkan kepada stakeholders dalam mengatasi berbagai macam konflik

3. Menemukan resolusi konflik yang dapat dilakukan dalam memecahkan konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat

D. Urgensi Penelitian

Urgensi dari penelitian ini adalah merujuk kepada bidang prioritas nasional, yaitu: berkaitan dengan stabilitas keamanan, di mana saat ini bangsa Indonesia membutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai macam konflik yang belakangan ini sering terjadi dan disadari jika tidak dilakukan upaya pemecahan yang mengakur kemungkinan besar akan terjadi konflik dan terus berulang yang pada akhirnya akan mengancam stabilitas pemerintah, stabilitas perusahaan serta stabilitas masyarakat itu sendiri, yang berdampak negative pada berbagai aspek, khususnya aspek kesejahteraan masyarakat.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Konflik

Konsep konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik juga merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan seringkali bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Jawed Luddin, 2002). Oleh karena itu, konflik dirasakan tetap berguna apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan sebuah masyarakat yang heterogen dalam berbagai sendi kehidupan.

Konflik meskipun menimbulkan masalah, namun konflik juga memberikan manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut antara lain, membuat orang-orang menyadari adanya banyak masalah, mendorong ke arah perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, menambah kepedulian diri, mendorong psikologis.

Menurut Wijono (1993 : 66-112), untuk mengatasi konflik dalam diri individu diperlukan paling tidak tiga strategi yaitu: **1) Strategi Kalah-Kalah (Lose-Lose Strategy)**. Berorientasi pada dua individu atau kelompok yang sama-sama kalah. Biasanya individu atau kelompok yang bertikai mengambil jalan tengah (berkompromi) atau membayar sekelompok orang yang terlibat dalam konflik atau menggunakan jasa orang atau kelompok ketiga sebagai penengah. Dalam

strategi kalah-kalah, konflik bisa diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga bila perundingan mengalami jalan buntu. Maka pihak ketiga diundang untuk campur tangan oleh pihak-pihak yang berselisih atau barangkali bertindak atas kemauannya sendiri.

Ada dua tipe utama dalam campur tangan pihak ketiga yaitu: a. Arbitrasi (Arbitration) Arbitrasi merupakan prosedur di mana pihak ketiga mendengarkan kedua belah pihak yang berselisih, pihak ketiga bertindak sebagai hakim dan penengah dalam menentukan penyelesaian konflik melalui suatu perjanjian yang mengikat. b. Mediasi (Mediation). Mediasi dipergunakan oleh Mediator untuk menyelesaikan konflik tidak seperti yang diselesaikan oleh abriator, karena seorang mediator tidak mempunyai wewenang secara langsung terhadap pihak-pihak yang bertikai dan rekomendasi yang diberikan tidak mengikat. **2) Strategi Menang-Kalah (Win-Lose Strategy)**. Dalam strategi saya menang anda kalah (win lose strategy), menekankan adanya salah satu pihak yang sedang konflik mengalami kekalahan tetapi yang lain memperoleh kemenangan.

Beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan win-lose strategy (Wijono, 1993), dapat melalui: a. Penarikan diri, yaitu proses penyelesaian konflik antara dua atau lebih pihak yang kurang puas sebagai akibat dari ketergantungan tugas (task independence), b. Taktik-taktik penghalusan dan damai, yaitu dengan melakukan tindakan perdamaian dengan pihak lawan untuk menghindari terjadinya konfrontasi terhadap perbedaan dan kekaburan dalam batas-batas bidang kerja (jurisdictional ambiguity), c. Bujukan, yaitu dengan membujuk pihak lain untuk mengubah posisinya untuk mempertimbangkan informasi-informasi faktual yang relevan dengan konflik, karena adanya rintangan komunikasi (communication barriers). d. Taktik paksaan dan penekanan, yaitu menggunakan kekuasaan formal dengan menunjukkan kekuatan (power) melalui sikap otoriter karena dipengaruhi oleh sifat-sifat individu (individual traits). e. Taktik-taktik yang berorientasi pada tawar-menawar dan pertukaran persetujuan sehingga tercapai suatu kompromi yang dapat diterima oleh dua belah pihak, untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan persaingan terhadap sumber-sumber (competition for resources) secara optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan, **3) Strategi Menang-Menang (Win-Win Strategy)**. Penyelesaian yang dipandang manusiawi, karena menggunakan segala pengetahuan, sikap dan keterampilan menciptakan relasi komunikasi dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman dari ancaman, merasa dihargai, menciptakan suasana kondusif dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi masing-masing dalam upaya penyelesaian konflik. Jadi strategi ini menolong memecahkan masalah pihak-pihak yang

terlibat dalam konflik, bukan hanya sekedar memojokkan orang. Strategi menang-menang jarang dipergunakan dalam organisasi dan industri, tetapi ada 2 cara didalam strategi ini yang dapat dipergunakan sebagai alternatif pemecahan konflik interpersonal yaitu: a. Pemecahan masalah terpadu (Integrative Problema Solving) Usaha untuk menyelesaikan secara mufakat atau memadukan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak, b. Konsultasi proses antar pihak (Inter-Party Process Consultation) Dalam penyelesaian melalui konsultasi proses, biasanya ditangani oleh konsultan proses, dimana keduanya tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik dengan kekuasaan atau menghakimi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat konflik

B. Pendekatan dalam mengelola Konflik

Banyak ragamnya upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Berbagai pendekatan untuk menangani konflik meliputi: (1) Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras, (2) Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian (3) Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat, (4) Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berkonflik, (5) Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik social dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari konflik menjadi kekuatan social dan politik yang positif.

C. Teori Berbagai Penyebab Konflik

Ada beberapa teori mengenai berbagai penyebab konflik. Menurut Simon Fisher & Sue Williams (2003) dikatakan bahwa ada 5 teori penyebab konflik, yaitu:

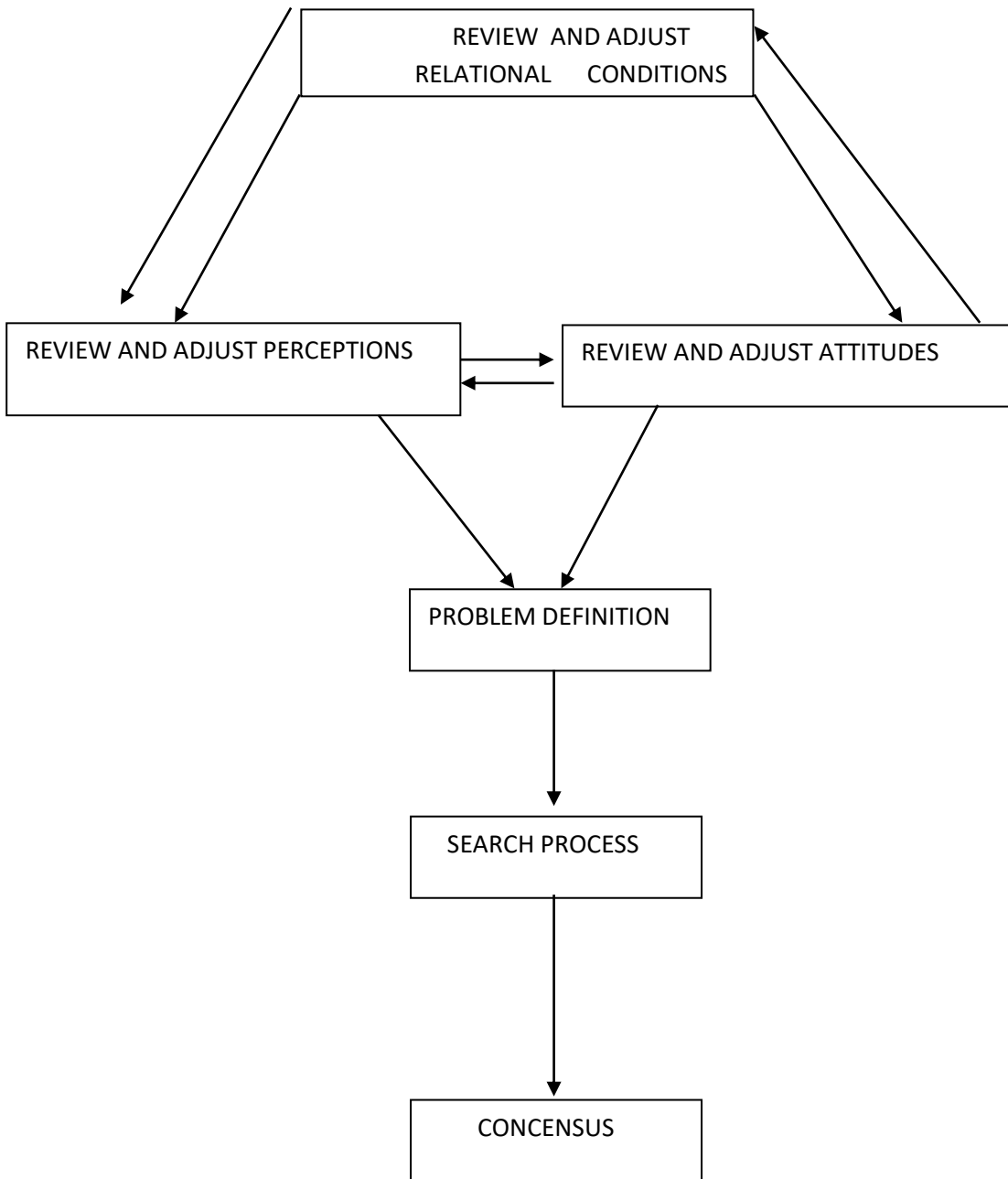
1. Teori Hubungan Masyarakat
2. Teori Negosiasi Konflik
3. Teori Kebutuhan Masyarakat
4. Teori Identitas
5. Teori Transformasi Konflik

D. Analisis Konflik

Terdapat beberapa alat bantu untuk menganalisis konflik yaitu meliputi: (1) Penahapan konflik, (2) Urutan kejadian, (3) Pemetaan konflik, (4) Segitiga SPK, (5) Analogi Bawang Bombay, (6) Pohon konflik, (7) Analisis kekuatan konflik, (8) Analogi Pilar, (9) Piramida.

Dari ke lima teori konflik, dapat disimpulkan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan berbagai upaya dan hal ini berkaitan dengan metode resolusi konflik yang bersifat “*win-win methods*” (Burke, 2000). Strategi dari metode “win-win” menggunakan dua formula dasar, yaitu : metode pengambilan keputusan yang bersifat konsensus dan integrasi. Metode ini disebut juga dengan metode IDM (*Integrative Decision Making*) dengan 6 elemen, yaitu : 1) *review and adjustment of relational conditions*, 2) *review and adjustment of perceptions*, 3) *review and adjustment of attitudes*, 4) *problem solving*, 5) *search for solution*, 6) *concensus decision*.

Secara lebih jelas, metode “win-win solution” dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar : Metode Pengambilan Keputusan Integrasi (Burke, 2003)

E. Sumber Konflik

Kriesberg (1998) mendefinisikan konflik sebagai: “ *two or more persons or groups manifest to belief that they have incompatible objectivities*”. Aman Saputra (2009) mengatakan konflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam hal proses social. George Mills disebutkan bahwa

konflik akan besar sumbangannya dalam mencegah kebekuan social (dalam Millah Saeful, 2012). Jika pada kenyataannya terjadi benturan-benturan nilai yang ada dalam masyarakat, maka hal itu tidak akan mengarahkan terciptanya new equilibrium (Effendi, 2002). Oleh karena itu, menurut Durkheim dalam kehidupan social perlu adanya solidaritas social yang terbentuk dalam masyarakat sebagai proses keseimbangan.

Menurut Dahrendorf untuk menyelesaikan konflik perlu ada pemaksaan melalui kesepakatan (consensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui consensus nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan itulah masyarakat dapat dipersatukan dan dikendalikan, sehingga tidak terjadi konflik yang menjadi bencana sosial. Model resolusi Dahrendorf inilah yang kemudian diadopsi, sehingga melahirkan model resolusi litigasi, model non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase).

Prayogo (2004) mengatakan bahwa konflik antara pemerintah, korporasi (perusahaan) dan masyarakat bukan untuk saling menjatuhkan melainkan untuk mendapatkan keputusan dan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.

F. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Program CSR

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang "pembangunan berkelanjutan" (*sustainable development*) yang menyatakan bahwa:" CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau pun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaanya beserta seluruh keluarganya".

Hasil Survey "The Millenium Poll on CSR" (1999) yang dilakukan oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business Leader Forum (London) di antara 25.000 responden dari 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini tentang perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan paling berperan. Sedangkan bagi 40% lainnya, citra perusahaan & *brand image*-lah yang akan paling memengaruhi kesan mereka. Hanya 1/3 yang mendasari opininya atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan, strategi

perusahaan, atau manajemen. Lebih lanjut, sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR adalah ingin "menghukum" (40%).

Prinsip pengembangan masyarakat yang paling mendasar menuju kesejahteraan menurut Ife (2000) adalah : 1) integrated development, yaitu kerjasama yang terintegrasi dan memperhitungkan berbagai aspek dan institusi terkait, 2) human right, menjamin pemenuhan hidup yang layak, 3) sustainability, tidak untuk kepentingan sesaat, tidak menimbulkan dampak negative kepada lingkungan hidup manusia, 4) empowerment, pemberdayaan pengetahuan, keterampilan bagi warga masyarakat dan 5) cooperation, membutuhkan struktur yang kooperatif dan harmonis.

Berdasarkan prinsip di atas, komponen pengembangan masyarakat meliputi: 3 unsur penting, yaitu: antara pemerintah- perusahaan dan masyarakat. Keikutsertaan perusahaan dalam pengentasan kemiskinan adalah bentuk partisipasi kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Baranco & Lucia L.R., 2006). Program dan pelaksanaan CSR harus sinergi dengan program pemerintah daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas lingkungan (Oto S.,2000; Kartini, 2009)

Menurut UU N0 32/2009, keberhasilan program CSR didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, dapat memberikan implikasi yang baik kepada perusahaan dalam perizinan demi penegakan hukum, sebagai antisipasi pelaksanaan tanggungjawab mutlak bagi perusahaan (Edi Suharto, 2009; Taufik Rachman, 2010). Selanjutnya, berdasarkan UU N0 40/2007. Pada pasal 74 ayat 1 menyatakan “bahwa program CSR merupakan salah satu kewajiban dan tanggungjawab social dan lingkungan oleh perusahaan”. Berdasarkan hasil penelitian Tajuddin L (2011) tentang implementasi program CSR di P.T. LHI di Sei Siring Kubar menunjukkan bahwa program CSR mampu mendongkrak income masyarakat hingga mencapai 62% tingkat keberhasilannya. Begitu pula hasil penelitian Ali Sadikin (2009) tentang implementasi program Comdev menunjukkan bahwa P.T. Trubaindo Coal Mining di Kubar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, meskipun masih terbatas pada pembangunan fisik dan belum menyentuh pembangunan non-fisik (capacity building).

Watts (1998) mengatakan: “ CSR is not a cosmetic, it must be rooted in our valued. It must make difference to the way we do our business” Dalam aplikasi di lapangan, CSR yang merupakan

wujud tanggungjawab social perusahaan terhadap pembangunan masyarakat masih banyak dilakukan karena factor belas kasihan (charity) atau dilakukan karena keterpaksaan. Sebagai belas kasihan karena perusahaan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat miskin ala kadarnya tanpa memandang sebagai wujud tanggungjawab sosialnya. Dan sebagai paksaan, karena bantuan baru menyusul kemudian diberikan setelah adanya aksi protes dari masyarakat . Oleh karena itu, CSR tidak boleh dihindari oleh perusahaan sebagai tuntutan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, yaitu mengkaji permasalahan yang muncul dan berupaya menemukan alternative resolusi konflik melalui disain manajemen dalam upaya menyelesaikan kasus konflik yang terjadi antara pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

2. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara secara mendalam (depth-interview), dengan didukung observasi, baik langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, juga dilakukan FGD dengan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dilengkapi dengan studi literature dan dokumentasi.

Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara mendalam yang diperoleh langsung pihak yang terkait (Distamben, Disbun, perusahaan) yang memiliki konflik, Kecamatan, Kelurahan, dan tokoh masyarakat, warga sekitar area lahan perusahaan, serta LSM) dan pelaksanaan program CSR oleh perusahaan. Data sekunder adalah seluruh data yang mendukung dan memperkaya serta memperkuat hasil wawancara dan observasi lapangan.

3. Teknik Pengambilan Sampel

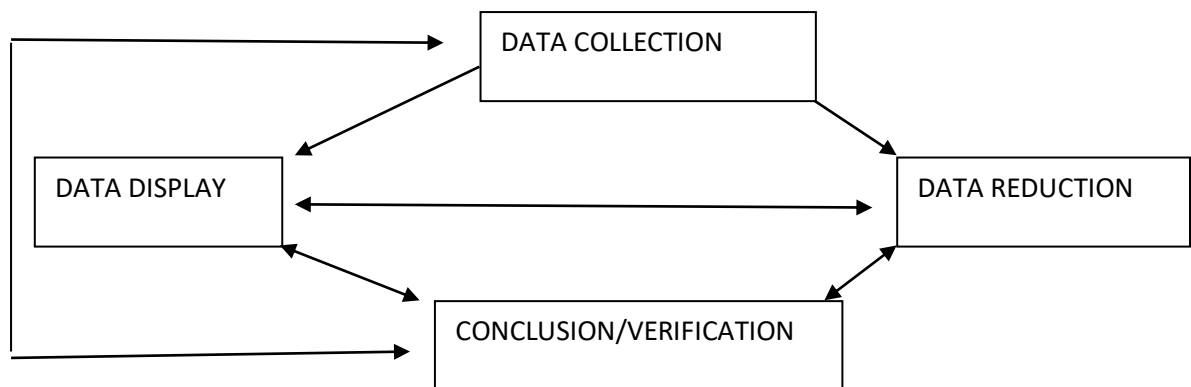
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik “purposive sampling” dengan criteria tertentu, yaitu: 1) daerah yang paling banyak memiliki ijin konsesi pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, 2) daerah ring 1, yaitu daerah yang dekat dengan pemukiman penduduk, 3) area tambang dan perkebunan kelapa sawit yang

mempunyai kasus konflik dengan warga sekitar. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan mengembangkan informan melalui triangulasi dengan pola snowball sampling.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan konflik dan resolusi konflik dalam rangka menyusun desain manajemen resolusi konflik yang diharapkan.

Secara garis besar analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Miles Huberman, 1994

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dari deskripsi yang sudah diuraikan dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut:

(a) Kasus konflik yang terjadi pada perusahaan tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur terdiri dari: 1) Kasus konflik pembebasan lahan, tumpang tindih lahan dan ganti rugi yang tidak sesuai dan bahkan ada yang belum memperoleh), 2) Kurangnya pemberian kesempatan bagi warga sekitar untuk menjadi pekerja di perusahaan, 3) Kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada warga masyarakat sekitar (banjir, polusi udara, penyakit kulit), 4) Ladang berpindah terganggu oleh aktivitas tambang, 5) Sumber air habis akibat penggalian tambang, 6) Tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam proses perijinan, 7) Kasus pembangunan kebun plasma, 8) Tanah adat atau hak ulayat. (b) Upaya yang ditempuh untuk melakukan resolusi konflik pada kasus konflik yang terjadi di perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur adalah : pada umumnya perusahaan swasta dan juga perusahaan negara selalu memilih dan memanfaatkan mekanisme “litigasi”, yaitu memasukkan kasus konflik lahan ke ranah pengadilan. Dan hasil keputusan pengadilan sudah

dapat diduga memenangkan pihak perusahaan, karena memiliki dokumen-dokumen resmi dan legal yang membuktikan kepemilikan atau hak pengelolaan atas areal lahan tersebut. Sementara itu komunitas adat, petani selalu kalah dalam proses pengadilan karena pada kelompok ini hanya memiliki bukti adat seperti ceritera atau surat kesaksian yang tidak diakui oleh pihak pengadilan. Proses litigasi sering menyebabkan komunitas kecil merasa tidak mendapat perlakuan yang adil. Kasus lainnya terkait dengan dampak keberadaan lahan perusahaan kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung tidak ada kepedulian (c) Resolusi konflik melalui disain manajemen untuk memecahkan kasus konflik yang terjadi dilakukan melalui : a) pendekatan Non -Litigasi (yaitu melalui mediasi dialog kelompok yang terlibat konflik). Penyelesaian konflik melalui non-litigasi dilakukan dengan pertimbangan bagi mereka yang bersengketa sebagai upaya penyelesaian yang cepat karena tanpa prosedur pengadilan pada umumnya dengan menggunakan pola “Tripartit”. Penyelesaian biasanya berakhir dengan “win-win solution”, yaitu menguntungkan masing-masing pihak yang bersengketa. Misalnya: penyediaan lahan plasma, namun berada di luar area perkebunan, b) membangun daya dukung bagi kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lahan untuk “food- estate” oleh pemerintah propinsi Kalimantan Timur dan c) melindungi kepentingan ekonomi masyarakat dan pelestarian sumber daya alam melalui pola konservasi alam.

BAB IV: KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Terdapat banyak kasus konflik yang terjadi pada area tambang batu bara dan lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur yang bersentuhan dengan warga masyarakat, pemerintah dan perusahaan.
2. Penyelesaian konflik yang dilakukan selama ini adalah melalui jalur litigasi oleh perusahaan dan demonstrasi atau aksi protes (damai dan kekerasan) oleh warga sekitar.
3. Program CSR telah dijalankan oleh perusahaan (tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit), namun belum sesuai dengan konsep dasar program CSR yang benar dan masih bersifat sementara serta belum bersifat sustainability.

4. Resolusi konflik dalam disain manajemen dilakukan dengan prosedur non-litigasi (mediasi, negosiasi dan arbitrase), kemudian mencetak food-estate dan perlindungan lingkungan dengan menyediakan lahan konservasi alam (culture, fauna dan flora serta tumbuhan obat tradisional)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sadikin, 2009. *Implementasi Program CSR pada Masyarakat Sekitar Tambang Batu bara di Kubar*, Thesis (tidak dipublikasikan), Unmul, Samarinda
- Anonim, 2012. *CSR Kembangkan Pertanian*, Kaltim Pos, Juli 2012
- Anonim, 2012. *Food Estate Masih Tertinggal*, kaltim Pos, September 2012
- Bachriadi, Dianto. 1999. *Gerakan Petani dan Tumbuhnya Organisasi Petani di Indonesia*
- Batten, T.R., 1967. *Communitiest and their Development*, London University Press
- Irwin, Harry, 1994. *Managing Corporate Communication*, Malaysia
- Irwanto, 2006. *Focussed Group Discussion , Sebuah Pengantar*, Jakarta, yayasan Obor
- Isran Noor, 2012. *CSR Bisa Entaskan Kemiskinan*, Kaltim Pos: Agustus 2012
- Jim Ife, 1995. *Community Development, Analysis and Practice*, longman, Australia
- Mursyid R., 2012. *Mayoritas Tambang Tidak Taat Aturan*, Kaltim Pos, 4 September
- Nasution S., 1988. *Penelitian Naturalistik*, Jemmars, Bandung
- Anonim, 2012. *Food Estate Masih Tertinggal*, kaltim Pos, September 2012
- Pambudi T.S. 2005. *CSR Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Puspennas Depsos, RI, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Krayan No. 1 Gedung A 20 Lt. 2 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
Telp. (0541) 741033, 748482 Fax. (0541) 741033, e-mail : lemlit_unmul@yahoo.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN
MASTER PLAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA (MP3EI) TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 485/H.17.16/PG/2014

Pada hari ini **SENIN** tanggal **TUJUH** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU EMPAT BELAS** bertempat di **LEMLIT UNMUL** diadakan serah terima Laporan Kemajuan Penelitian Masterplan Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) **SUMBER DANA DIKTI** atas nama :

1. Nama : Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd

Judul : Resolusi Konflik Melalui Disain Managemen Program Sinergi Revitalisasi Antara Pemerintah (Disperdagkop-Disbun, Distamben) Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Koridor Pemberdayaan Ekonomi Di Kalimantan Timur.

Disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Prof. Dr. Makrina Tindangen. M. Pd

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

Disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian Masterplan Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) **SUMBER DANA DIKTI** Tahun 2014 kepada pihak kedua sebanyak 3 (Empat) eksemplar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.



Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd
NIP. 19630903 198710 2 001

PIHAK PERTAMA
Ketua Paneliti,


Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd
NIP. 19570829 198503 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Krayan No. 1 Gedung A 20 Lt. 2 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
Telp. (0541) 741033, 748482 Fax. (0541) 741033, e-mail : lemlit_unmul@yahoo.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN
DESENTRALISASI PASCA SARJANA SUMBER
DANA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2014**
Nomor : 483/H.17.16/PG/2014

Pada hari ini **SENIN** tanggal **TUJUH** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU EMPAT BELAS** bertempat di **LEMLIT UNMUL** diadakan serah terima Laporan Kemajuan Penelitian Desentralisasi Pasca Sarjana **SUMBER DANA BOPTN** atas nama :

1. Nama : Prof. Dr. Ichrar Asbar, M.S
Judul : Implementasi Manajemen Program Pengintegrasian Metodologi Pembelajaran dan Pendidikan Karakter Kewirausahaan Pada Tingkat Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Samarinda.

Disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Prof. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman


Disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian Desentralisasi Pasca Sarjana **SUMBER DANA BOPTN** Tahun 2014 kepada pihak kedua sebanyak 3 (Tiga) eksemplar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.



PIHAK PERTAMA
Ketua Peneliti,


Prof. Dr. Ichrar Asbar, M.S
NIP. 194812111984031001